



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

PPAS

**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem perencanaan pembangunan daerah. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas, maka untuk tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mempunyai kewajiban untuk menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPASP) yang mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025, Program dan kegiatan serta pagu indikatif kegiatan merupakan suatu hal yang diacu dan ditaati sampai dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Program/kegiatan yang tidak ada dalam

RKPD dan KUA/PPAS akan sangat sulit untuk diakomodir dalam APBD Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan kondisi tersebut penyusunan Perubahan PPAS tahun 2025 ini merupakan suatu hal yang harus dicermati, ditelaah, dan dibahas secara seksama agar dalam pelaksanaannya menjadi benar-benar baik dan mengakomodir semua kebutuhan yang riil, rasional, dan secara nyata berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan PPAS Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan penjabaran RAPBD Tahun 2025.

BAB II
PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan pada perubahan PPAS Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

- 1.** Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah menjelang semester I tahun 2025;
- 2.** Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, yang diakibatkan penyesuaian dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) serta berkurangnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam;
- 3.** Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya :
 - a. untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari dana hibah, sebelumnya tidak di target, di perubahan di masukan target
 - b. untuk dana bagi hasil provinsi di tambahkan dari target yaitu kurang salur tahun sebelumnya yang akan di terima di tahun ini

Secara rinci proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan PPAS tahun 2025 dapat terlihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Proyeksi Penerimaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2025

KODE	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)		
		APBD	PPAS PERUBAHAN	Bertambah/ Berkurang (5-4)
1	2	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.846.354.884.462,00	1.806.526.090.600,90	-39.828.793.861.10
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.950.017.200,00	165.728.615.286,00	4.778.598.086,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	45.816.000.000,00	49.713.204.000,00	3.897.204.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.756.723.083,00	5.057.255.083,00	300.532.000,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg di Pisahkan	7.062.433.158,00	8.236.194.664,00	1.173.761.506,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	103.314.860.959,00	102.721.961.539,00	-592.899.420,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.648.223.693.407,00	1.582.987.938.783,90	-65.235.754.623,10
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.587.514.503.000,00	1.473.390.311.000,00	-114.124.192.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	60.709.190.407,00	109.597.627.783,90	48.888.437.376,90
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.181.173.855,00	57.809.536.531,00	20.628.362.676,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37.181.173.855,00	44.209.536.531,00	7.028.362.676,00

Sumber: BPKAD dan BAPPELITBANGDA Kab. Parigi Moutong (diolah) Tahun 2025

2.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perubahan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 32.169.938.712,06 atau 4,64 % dari total belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 total belanja menjadi sebesar Rp. 1.831.197.418.516,94 yang sebelumnya Rp. 1.863.367.357.229,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 1,72 % yang sebelumnya sebesar Rp. 1.357.433.448.020,00 menjadi Rp. 1.380.103.451.153,94
- 2) Belanja Modal kebutuhan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp. 163.428.325.630,00 mengalami penurunan 29,75 % atau sebesar Rp. -48.628.367.911,00 sehingga belanja modal menjadi Rp. 114.799.957.719,00
- 3) Belanja Tidak Terduga, mengalami penurunan sebesar Rp.2.550.000.000,00 atau 25,5 % sehingga total alokasi belanja tak terduga menjadi sebesar Rp. 7.450.000.000,00 dari sebelumnya yang dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00
- 4) Belanja transfer mengalami Penurunan sebesar Rp.3.661.573.935,00 atau 1,10 % sehingga total belanja menjadi sebesar Rp. 328.844.009.644,00

dari yang sebelumnya sebesar Rp. 332.505.583.579,00

Kenaikan anggaran belanja pada Perubahan PPAS Tahun 2025 tersebut diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1.** Penyesuaian program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Penyesuaian anggaran dan program/kegiatan dilaksanakan untuk program/kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan faktual serta dalam rangka pencapaian target kinerja pada RKPD tahun 2025 dan RPD Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian tersebut terdiri dari :
 - Penambahan anggaran untuk program/kegiatan yang tidak dapat ditunda atau bersifat mendesak dan pembayaran utang.
 - Penambahan anggaran untuk program/kegiatan baru yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025. Penyesuaian anggaran untuk program/kegiatan yang merupakan peningkatan pendapatan sehingga pada akhir tahun 2025 target pendapatan tercapai.
 - b. Pengurangan anggaran dan pengurangan program/kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan.
 - Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena penyesuaian dengan regulasi dan prioritas serta sasaran pembangunan.
 - c. Pergeseran anggaran dan pergeseran Program/kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - Adanya penyesuaian dengan regulasi/Kebijakan Nasional
 - Adanya perubahan lokasi sasaran kegiatan.
- 2.** Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- 3.** Belanja mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan program prioritas Nasional dan Provinsi yaitu :
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan Kesehatan.
 - b. Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 - c. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim.
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah.
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

- f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengamanan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Belanja yang digunakan dalam mendukung program kebijakan daerah yaitu :
- a. Penambahan pembiayaan program UHC
 - b. Bantuan Pemulangan Jenazah (Ambulance Gratis)
 - c. Beasiswa untuk Dokter Spesialis pada RSUD
 - d. Pemberian seragam sekolah gratis
 - e. Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 - Pemetaan Penerima Program MBG
 - Penyiapan Lahan untuk fasilitas pendukung MBG
 - Survei kesiapan bahan pangan untuk mendukung MBG
 - Penyiapan ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung MBG
 - f. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim.
 - g. Kunjungan tenaga kesehatan masyarakat
 - h. Bantuan Gas untuk masyarakat miskin ekstrim
 - i. Penataan Kota Parigi.
5. Pemberian Hibah yang digunakan pada pelaksanaan Pengumutan Suara Ulang (PSU) Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Rincian proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan PPAS
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD	PPAS PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (5-4)
1	2	4	5	6
5.	BELANJA			
5.1.	BELANJA OPERASI	1.357.433.448.020,00	1.380.103.451.153,94	22.670.003.133,94
5.1.1	Belanja Pegawai	842.547.901.751,21	861.446.749.268,92	18.898.847.517,71
5.1.2.	Belanja Brang dan Jasa	488.553.931.864,46	476.584.098.106,69	-11.969.833.757,77
5.1.3	Belanja Bunga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	24.769.514.554,33	40.510.503.928,33	15.740.989.374,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.462.099.850,00	1.462.099.850,00	0,00
5,2	BELANJA MODAL	163.428.325.630,00	114.799.957.719,00	-48.628.367.911,00

KODE	URAIAN	APBD	PPAS PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (5-4)
1	2	4	5	6
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	7.450.000.000,00	-2.550.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	332.505.583.579,00	328.844.009.644,00	-3.661.573.935,00
	JUMLAH BELANJA	1.863.367.357.229,00	1.831.197.418.516,94	-32.169.938.712,06
	Surplus/ (Defisit)	- 17.012.472.767,00	-24.671.327.916,04	-7.658.855.149,04

Sumber: BPKAD dan BAPPELITBANGDA Kab. Parigi Moutong (diolah) Tahun 2025

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada perubahan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 mengalami defisit belanja sebesar Rp 24.671.327.916,04 yang disebabkan karena proyeksi Perubahan pendapatan Tahun 2025 Rp. 1.806.526.090.600,90 lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja pada Perubahan PPAS yang direncanakan sebesar Rp. 1.831.197.418.516,94.

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga.

Perubahan belanja daerah tahun 2025 tetap dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan perubahan belanja Tahun 2025 telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Perubahan Belanja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2025 antara lain :

- a. Penganggaran Belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran serta diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dengan prinsip *Money Follow Program* dalam rangka pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Parigi Mouton Tahun 2024-2026.
- b. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, memperluas penyediaan kesempatan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- c. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung

menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal.

- d. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya termasuk antisipasi terhadap potensi bencana yang cenderung meningkat beberapa waktu terakhir.
- e. Kebijakan terkait *mandatory spending* tetap dipertahankan. Pada tahun 2025 alokasi Bidang Pendidikan adalah minimal sebesar 20% dan bidang Kesehatan dialokasikan minimal sebesar 10%.

2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah salah satunya digunakan untuk menutupi defisit anggaran daerah Kabupaten Parigi Moutong, dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus

terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Gambaran realisasi dan proyeksi/target Pembiayaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Perubahan PPAS
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD	PPAS PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2		4	5
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.512.472.767,00	28.921.327.916,04	6.408.855.149,04
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.512.472.767,00	28.921.327.916,04	6.408.855.149,04
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.512.472.767,00	28.921.327.916,04	6.408.855.149,40
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	500.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.500.000.000,00	4.250.000.000,00	-1.250.000.000,00
	NETTO PEMBIAYAAN DAERAH	17.012.472.767,00	24.671.327.916,04	7.658.855.149,04

Sumber: BPKAD dan BAPPELITBANGDA Kab. Parigi Moutong (diolah) Tahun 2024

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
2. Menyediakan dana untuk pembayaran pokok utang pinjaman luar negeri sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai pencapaian pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong, Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024-2026 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 serta dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong 2025-2045 yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah.

Dengan mengacu pada dua dokumen tersebut diatas perlu melakukan penyesuaian kembali target indikator kinerja. Prioritas, sasaran daerah, indikator sasaran, target dan penyesuaian target tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026, arah kebijakan Pembangunan Tahun 2025 direpresentasikan dengan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Penguatan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Kawasan”. Tema pembangunan ini telah disinkronkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi Sulawesi Tengah.



Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah perlu ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong. Prioritas dan sasaran pembangunan Parigi Moutong 2025, Keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	TUJUAN		SASARAN			Satuan	Capaian 2024	Target 2025	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6			7	8
1	Tata kelola birokrasi yang, efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	1	Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Poin	63,09	44	64
						75	65,27	75	75
			2	Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WDP	WTP	WTP
2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang berdaya saing	Harapan Lama Sekolah	Poin	69,48	69,50	69,50
					Rata rata lama sekolah	Tahun	12,52	12,51	12,56
			2	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,72	67	68,80
					Prevalensi Stunting	Persen	8,7	18,68	18,68
			3	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan	Persen	14,20	14,10	14,10
3	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1	Meningkatnya produksi pertanian, Perikanan dan Kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Berlaku	3,58	5,01	5,01
						Rupiah (juta)	9.969,49	10.146,86	10.146,86
			3	Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	PDRB Pengolahan	Konstan	5.589,60	5.960,88	5.960,88
						Rupiah (juta)	546,63	545,43	545,43
			3	Meningkatnya investasi daerah	realisasi investasi	Rupiah	302,00	312,94	312,94
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	72,81	79,65	79,65
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	50,00	65,60	65,60
					Indeks Tutupan Lahan	Poin	94,61	94,86	94,86
			2	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	71,68	78,79	78,79
						Poin	93,53	108,39	93
5	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	1	Meningkatnya ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	100	81	100
						Persen	20	19	20

3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan, dalam merencanakan pembangunan . Berdasarkan telaah hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, prioritas pembangunan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2025 masih mengacu pada prioritas pembangunan pada RPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026. serta kebijakan nasional yang menjadi isu/prioritas pembangunan nasional yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah antara lain :

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- h. Fasilitasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran Pembangunan nasional, prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2026. Prioritas, Sasaran dan penyelarasan antara pusat dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.3.2

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
1	Reformasi Birokrasi	- Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel
		- Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien
2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	- Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang berdaya saing
		- Kualitas Kesehatan yang berdaya saing
		- Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin
3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	- Meningkatnya produksi pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		- Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan
		- Meningkatnya investasi daerah
4	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan
		- Menurunnya Resiko Bencana
		- Meningkatnya ruang terbuka hijau

Keterkaitan antara Prioritas Nasional tahun 2025, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel.3.3

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Reformasi Birokrasi
2	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.	
	mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
7	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan

Tabel.3.4

**Penyelarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2025**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025
1	Berani Cerdas	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
2	Berani Sehat	
3	Berani Berkah	
4	Berani Sejahtera	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
5	Berani Lancar	
6	Berani Harmoni	
7	Berani Menyala	
8	Berani Makmur	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
9	Berani Berintegritas	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan
		Reformasi Birokrasi

Tabel .3.5

**Sandingan Prioritas dan indikator Nasional, Propinsi, Kabupaten Tahun
2025**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
1	Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	• Berani Berintegritas	• Reformasi Birokras	1. Indeks demokrasi Indonesia 2. Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 3. Indeks reformasi hukum 4. Indeks kerukunan beragama	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Indeks Reformasi Hukum (IRH) 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 5. Indeks Integritas Nasional
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan Ekonomi Biru	• Berani Makmur • Berani Sejahtera • Berani Berintegritas	• Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Indeks ekonomi hijau 2. Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment)	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
3	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri ekonomi kreatif serta mengembangkan	• Berani Cerdas • Berani Sehat • Berani Lancar • Berani Harmoni	• Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Presentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi 2. Rasio konektivitas simpul transportasi provinsi 3. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman 4. Ketahanan energi 5. Ketahanan air	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
	agromaritim industri sentra produksi melalui peran aktif koperasi				
4	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia SDM, Sains teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran Perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas	- Berani Cerdas - Berani Sehat - Berani Sejahtera	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	- Usia harapan hidup - Angka kematian ibu / 100.000 - Prevalensi stunting - Penanganan tuberkulosis dan eliminasi schistosomiasis - Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) - Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) - Prevalensi Schistosomiasis - Kecakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Provinsi - Hasil pembelajaran : - Literasi - Numerasi - rata-rata lama sekolah - Harapan lama sekolah - Angka Melek huruf penduduk usia diatas 15 Tahun - Angka partisipasi sekolah - Presentasi pekerjaan lulusan menengah/SMK yang terserap di dunia kerja dan industri - Proporsi usia penduduk usia 15 tahun keatas yang berkualitas Pendidikan tinggi - Tingkat kemiskinan - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan - Presentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal - Indeks ketimpangan gender - Tingkat pengangguran terbuka - Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan - Indeks Daya Saing - Indeks pembangunan kebudayaan - Indeks pembangunan kualitas keluarga	- Harapan lama sekolah - Rata-rata lama sekolah - Usia harapan hidup - Prevalensi stunting - Angka kemiskinan - Indeks Gini
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan	- Berani Makmur - Berani Harmoni	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	- Koefisien variasi harga antar wilayah Tingkat provinsi - PMTB - Ekspor barang dan jasa - Indeks desa - Kontribusi PDRB provinsi - Rumah tangga dengan	Peringkat/realisasi investasi

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
	nilai tambah didalam negeri			akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 7. Rasio PDRB ADHK sektor industri pengolahan 8. Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHK 9. Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minuman b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang (Ribu orang) 10. Pendalaman/Intermediasi sektor Keuangan a. Total dana pihak ketiga/PDRB b. Aset dana pensiun/PDRB c. Total Kredit/PDRB d. Inklusi Keuangan e. Tingkat Inflasi	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	- Berani Makmur - Berani Sejahtera	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Proporsi PDRB ekonomi Kreatif 2. Produktifitas UMKM, Koperasi a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian b. Proporsi jumlah industry kecil dan menengah c. Rasio kewirausahaan Daerah d. Rasio volume koperasi terhadap PDRB e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1. PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2. PDRB Pengolahan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyulundupan	- Berani Berintegritas - Berani Berkah	Reformasi Birokrasi	1. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 2. persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM 3. Indeks kepemimpinan kepala daerah 4. Indeks Integritas nasional 5. Indeks pelayanan public 6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Indeks Daya Saing Daerah 8. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 9. Indeks Reformasi Birokrasi 10. Survey Penilaian Integritas 11. Nilai maturitas sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) 12. Indeks perencanaan Pembangunan nasional/daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	- Berani Harmoni - Berani Berkah - Berani	Pelestarian lingkungan yang Berkelanjutan	1. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah 2. Indeks resiko bencana 3. Presentase penurunan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Kualitas Air (IKA) 3. Indeks Kualitas

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
	lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Makmur		GRK 4. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 5. Persentase luas genangan yang tertangani 6. Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah 7. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Udara (IKU) 4. Indeks Tutupan Lahan 5. Indeks Resiko Bencana (IRB) 6. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan

3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN, isu strategis pembangunan Provinsi serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memperhatikan analisis terhadap Permasalahan Pembangunan Daerah serta kajian terhadap kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Parigi Moutong serta isu-isu strategis intemasional, nasional serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 berdasarkan hasil analisis tersebut isu strategis yang mendapatkan perhatian serius dan fokus pada 8 (delapan) hal dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Reformasi birokrasi
- Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)
- Peningkatan rata-rata lama sekolah
- Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
- Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
- Menurunkan angka pengangguran
- Penanggulangan Kemiskinan
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

A. Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Menggerakkan reformasi birokrasi melalui institusi Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pemda Kabupaten Parigi Moutong adalah subjek reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah

diwajibkan melakukan penilaian mandiri atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan mereka lakukan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang kesuksesan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di masa yang akan datang. Langkah menjalankan reformasi birokrasi tentu bukan perkara mudah harus menjadi komitmen semua pihak. Reformasi birokrasi hanya terjadi bila adanya dua hal yaitu pertama ada konsistensi: teguh, selalu memikirkan kelanjutan dan berkarakter. Kedua, konsekuen: cakap dalam tugas, sederhana, dan dapat diandalkan ketika melakukan banyak hal. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah masih dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah birokrat dan bentuk birokasinya yang berbelit-belit sehingga diperlukan langkah konkret di dalam memperbaiki kinerja birokrasi. Hal itu terlihat dari masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat baik itu disampaikan secara langsung maupun melalui media massa atau bahkan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan langkah strategis yang terpadu dan berbasis teknologi guna menjawab permasalahan dan tantangan di masa mendatang. Dengan pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, budaya transpransi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan menjadi isu utama di dalam penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong setidaknya didalam periode transisi Tahun 2024-2026. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi- fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

B. Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)

Urusan kesehatan merupakan satu dari beberapa urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi

kesehatan masyarakat menjadi satu dari berbagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional.

C. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah

Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa bahkan daerah. Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Cepat atau lambat suatu daerah dalam meningkatkan kajian ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan daerah tersebut memberikan layanan pendidikan dan kesehatan kepada penduduknya. Kondisi Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong masih rendahnya di mana terdapat penduduk usia sekolah yang tidak/belum sekolah dan buta huruf, Sebagian besar Indikator Pendidikan masih berada di bawah rata-rata Provinsi, Program pendidikan wajar 9 tahun belum tuntas, yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,33 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 8,96 Tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2023 yakni SD/MI (100,22), SMP (72,98%); Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2023 yaitu SD/MI (92,06%), SMP/MTs (78,50%), Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2023 pada tingkat SD/MI (97,52%), SMP/MTs (91,01%).

Sebagaimana diketahui bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan yang baik akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

D. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan selama

lima tahun terakhir, sedangkan pada sektor perikanan perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Namun peningkatan luas lahan ini tidak mempengaruhi hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Parigi Moutong. Luas lahan usaha perikanan darat khususnya kolam selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan ada pada angka 348 m², luas lahan perikanan tambak 10.058,35 m² mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan luas lahan budidaya perikanan laut 49.000 m² tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari penambahan luas lahan usaha perikanan tersebut tidak meningkatkan produksi perikanan karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sarana dan prasarana, SDM, terbatasnya modal serta bantuan peralatan perikanan pada nelayan.

E. Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan

Perindustrian merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Parigi Moutong menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadinya pemerataan pendapatan. Sektor industri merupakan sektor kunci (key sector) dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri di Kabupaten Parigi Moutong memberikan kontribusi terhadap perolehan PDRB Kabupaten Parigi Moutong dan memiliki peran penting sebagai penyanggah ekonomi masyarakat terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Parigi Moutong

Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan ADH Berlaku mencapai 2,30 persen dan berdasarkan ADH Konstan mencapai 2,69 persen. Untuk itu arah kebijakan Pembangunan sektor industri pengolahan terutama IKM-UKM pengolahan produk pertanian yang dipasarkan melalui berkembangnya pariwisata daerah baik alamnya maupun budayanya. Faktor lain yang mendukung sektor industri beberapa potensi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong perlu

mendapat sentuhan dari pemerintah agar dapat diolah oleh masyarakat dan meningkatkan kontribusi industri untuk PDRB, serta untuk penciptaan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

F. Menurunkan Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur.

G. Penanggulangan Kemiskinan

Dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong diperlukan percepatan dan inovasi yang harus dilakukan. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui :

- a. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
- b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial

Presiden, TopUp bansos reguler, dan Bantuan Beras;

- c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- d. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
- e. pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN)

2. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

- a. peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
- b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
- c. peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan
- d. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR);

3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

H. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Dalam rangka menjawab isu strategi tersebut perlu dirumuskan tema pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025. Adapun rancangan tema pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2025 adalah :

**“PENGUATAN PELAYANAN DASAR DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF BERBASIS
KAWASAN”**

Untuk mewujudkan tema pembangunan daerah pada tahun 2025, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong agar dapat memberi arah pembangunan yang jelas. Selanjutnya agar setiap prioritas pembangunan dapat diimplementasikan lebih terarah, maka prioritas tahun 2025 difokuskan pada ruang lingkup kegiatan sebagaimana tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Prioritas, Fokus dan Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan
Tahun 2025

PRIORITAS		FOKUS		KEGIATAN PRIORITAS
1	Reformasi Birokrasi	1	Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	• Pengembangan SDM melalui Diklat, workshop, Sosialisasi; • Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan
				• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah; • Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; • Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah.
2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	1	Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia yang berdaya saing	• Peningkatan kualitas pengelolaan Pendidikan • Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Peningkatan Minat Baca dan literasi berbasis inklusi social • Peningkatan Akses menuju fasilitas pendidikan
				• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan; • Peningkatan ketersediaan obat dan logistik kesehatan; • Penyediaan tenaga kesehatan dan pendistribusian yang merata di seluruh wilayah. • Peningkatan Akses menuju fasilitas Kesehatan • Melaksanakan Advokasi Pengendalian Penduduk dan KB • Meningkatkan Peran PKK dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting
				• Membuka lapangan kerja baru; • Melaksanakan operasi pasar secara berkala • Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai • Penyusunan Roadmap model peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
				• Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah • Pemberian Bantuan Modal Kerja
				• Merubah Status Desa pada Komunitas Adat Terpencil Menjadi Desa Adat
3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.	• Penyediaan sarana dan prasarana, bibit, pupuk, peningkatan kapasitas penyuluh bidang pertanian dan perikanan • Penerapan Teknologi tepat guna • Diversifikasi dan perluasan lahan Pertanian • Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan
				• Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan • Penguatan Kelembagaan pelaku Usaha dan bantuan modal usaha
				• Meningkatkan pemasaran hasil komoditi Pertanian dan Perikanan • Optimalisasi penciptaan lapangan kerja di

PRIORITAS		FOKUS		KEGIATAN PRIORITAS
4	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan			bidang pertanian dan perikanan
				• Mengoptimalkan penerapan system informasi terpadu untuk kemudahan perizinan dan investasi
		1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	• Pengawasan dan pengendalian sumber pencemaran air • Pengawasan dan pengendalian sumber pencemaran udara • Pemantauan luasan tutupan lahan
		2	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	• Melaksanakan simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan • Pemenuhan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang; • Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. • Mensosialisasikan dan melaksanakan penegakan PERDA dan PERKADA terkait Penataan Ruang.

Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Tahun 2025, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Dan Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Reformasi Birokrasi
2	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
7	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan

Tabel 3.6

**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2025**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2025
1	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
2	Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	
4	Meningkatkan Menandirian Fiskal Daerah	
5	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan
6	Meningkatkan Tata Kelola.Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN OPD

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai tabel berikut (lampiran ..)

BAB VII

P E N U T U P

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyusun dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dokumen Perubahan PPAS Kabupaten Parigi Moutong ini dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, yang merupakan bahan penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025.

